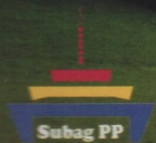
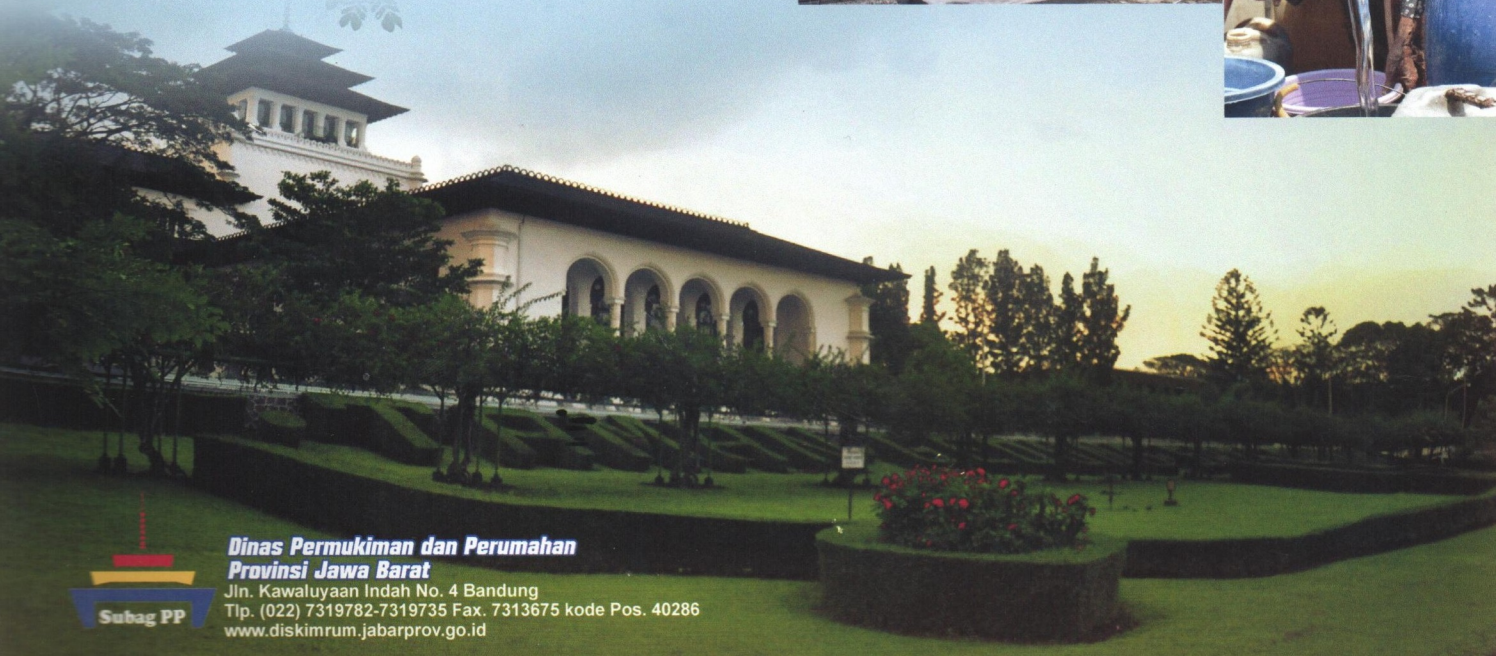




Rencana Kerja (RENJA)

***Dinas Permukiman dan Perumahan
Provinsi Jawa Barat***

Tahun 2016



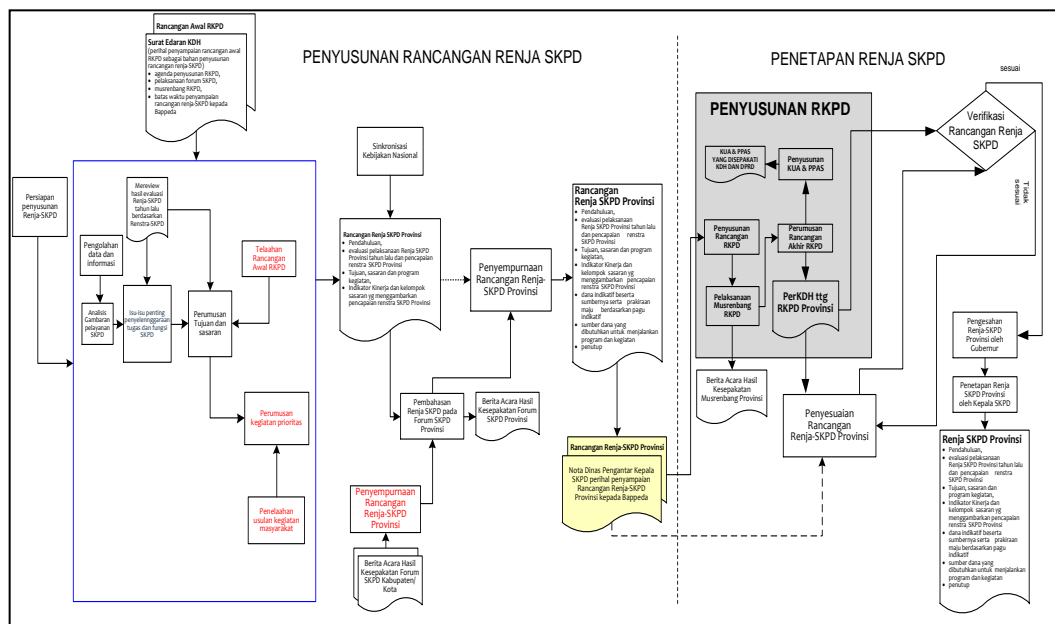
**Dinas Permukiman dan Perumahan
Provinsi Jawa Barat**
Jln. Kawalayaan Indah No. 4 Bandung
Tlp. (022) 7319782-7319735 Fax. 7313675 kode Pos. 40286
www.diskimrum.jabarprov.go.id

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyusun Renja yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis Dinas, sebagai acuan bagi pelaksanaan operasional kegiatan Dinas Permukiman dan Perumahan (Diskimrum) Provinsi Jawa Barat tahun 2016.

Penyusunan Renja Diskimrum Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 dilakukan melalui 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up). Proses penyusunan Renja Diskimrum Provinsi Jawa Barat dilakukan melalui 4 (empat) tahapan, yakni Penyusunan Rencana, Penetapan Rencana, Pengendalian Pelaksanaan Rencana dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana. Keempat tahapan dimaksud diselenggarakan secara berkelanjutan untuk membentuk satu siklus perencanaan yang utuh (Gambar 1).



Gambar 1.
Alur Penyusunan Rencana Kerja Diskimrum Provinsi Jawa Barat

Rencana Kerja Diskimrum merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 – 2018 serta secara teknis mengacu pada Rencana Strategis Diskimrum Tahun 2013-2018. Paradigma penyusunan Renja Diskimrum Provinsi

Jawa Barat diwarnai paradigma perencanaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pembangunan daerah Jawa Barat Tahun 2016 yang mengacu pada perencanaan SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Resources availabillity and Time*) yang merupakan pendekatan dalam perencanaan program dan kegiatan, dan *Shewhart Cycle (Plan-Do-Ceck-Act)* yang merupakan perencanaan yang berbasis evaluasi diri dan partisipatif.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Diskimrum Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo Perpu No. 3 Tahun 2005 Jo Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Jawa Barat 2005 – 2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 19 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Sisrenbangda) Provinsi Jawa Barat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 64);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 52 Tahun 2014 tentang RKPDJabar Online.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Diskimrum Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 disusun sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan yang memuat program dan kegiatan di Diskimrum. Renja menjadi penting untuk dilaksanakan secara konsisten dengan argumentasi bahwa implementasinya menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan bagi Diskimrum Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016. Adapun tujuan penyusunan Renja Diskimrum Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- Menjadi acuan bagi Diskimrum Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2016;
- Menyediakan arahan bagi aparatur Diskimrum Provinsi Jawa Barat dalam mencapai tujuan dengan implementasi program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
- Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Diskimrum Provinsi Jawa Barat dalam menilai implementasi program serta kegiatan operasional Tahun 2016; dan

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Diskimrum Provinsi Jawa Barat terdiri dari 4 (empat) bab yang dapat diuraikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Diskimrum Provinsi Jawa Barat Tahun 2014

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Diskimrum Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 dan Capaian Renstra Diskimrum Provinsi Jawa Barat Tahun hingga tahun 2014
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Diskimrum Provinsi Jawa Barat
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Diskimrum Provinsi Jawa Barat
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2016

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Diskimrum Provinsi Jawa Barat Tahun 2016
- 3.3. Program dan Kegiatan Diskimrum Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

Bab IV Penutup

Lampiran-Lampiran

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DISKIMRUM TAHUN 2016

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Diskimrum 2014 dan Capaian Renstra Diskimrum 2013-2018

Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Sementara itu indikator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai kinerja. Hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaian kinerjanya dengan menggunakan indikator kinerja. Kinerja dapat diartikan sebagai hasil/keluaran dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas. Pencapaian kinerja, sasaran merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian sasaran organisasi, sebagaimana dituangkan dalam sasaran setiap misi.

Pencapaian kinerja sasaran, merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian sasaran organisasi, yang tertuang dalam sasaran setiap misi. Visi Diskimrum Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, yaitu :

"TERWUJUDNYA PERMUKIMAN & PERUMAHAN YANG PRODUKTIF, HARMONIS DAN BERKELANJUTAN DALAM MENDUKUNG JAWA BARAT YANG MAJU DAN SEJAHTERA"

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- ❖ **Produktif** : Mendorong pemenuhan perumahan dan permukiman sebagai *sarana pendidikan* keluarga, *persemaian budaya* dan *pengembangan ekonomi dengan partisipasi penuh masyarakat* menuju kemandirian.
- ❖ **Harmonis** : Mendorong harmonisasi *antar wilayah dan antar sektor, antar jenjang pemerintahan, antar daerah, dan antar pelaku pembangunan.*
- ❖ **Berkelanjutan** : Mendukung pembangunan *berwawasan lingkungan dan berbasis mitigasi bencana* yang mengacu pada *tata ruang dan budaya lokal.*

- ❖ **Mendukung Jawa Barat yang Maju dan Sejahtera** : Menjadi OPD utama dari Pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang bertanggung jawab menjalankan misi ke-empat dari pembangunan menuju Jawa Barat yang maju dan sejahtera.

Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, dijabarkan ke dalam misi-misi, yang meliputi.

1. Meningkatkan Kinerja Penataan Ruang yang Berkualitas dan Implementatif;
2. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Perumahan dan Prasarana dan Sarana Kawasan Permukiman;
3. Meningkatkan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Berdasarkan Pengujian Mutu Konstruksi dan Lingkungan yang Berkualitas;
4. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan Prinsip *Good Governance*.

Upaya yang dilakukan oleh Diskimrum tidak terlepas dari Visi dan Misi Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 yaitu fokusnya pada **Misi Keempat, Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan**. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat pada Tahun 2018 yaitu Pembangunan Jawa Barat yang selaras dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan, memiliki infrastruktur dasar yang memadai, serta didukung oleh tersedianya infrastruktur yang mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi.

Pencapaian kinerja sasaran strategis Tahun 2016, telah selaras dengan target didalam Renstra Diskimrum Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 –2018, adapun sasaran strategis dan pencapaiannya adalah sebagai berikut :

Pencapaian indikator kinerja sasaran Tahun 2012 terhadap RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1.
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2016 Terhadap Target RPJMD Tahun 2013-2018

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi		Realisasi sampai dengan tahun 2015	Target RPJMD sampai dengan tahun 2018
				2013	2014		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
1	Meningkatnya Ketersediaan Rencana Penataan Ruang di Jawa Barat	1 Jumlah Pedoman Rencana Tata Ruang (RTR) Kabupaten/Kota di Kawasan Strategis Provinsi (KSP)	Dokumen	N/A	N/A		
		2 Jumlah Persetujuan Substansi Gubernur untuk Legalitas Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota di Jawa Barat	Dokumen	N/A	N/A		
2	Terselenggaranya pemanfaatan ruang yang berkelanjutan	Persentase Perangkat Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Bandung Utara	Persen	N/A	N/A		
3	Meningkatnya akses masyarakat terhadap ketersediaan air minum yang layak	Cakupan Pelayanan Air Minum	Persen	45,8	58-63		92,5

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi		Realisasi sampai dengan tahun 2015	Target RPJMD sampai dengan tahun 2018
				2013	2014		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
4	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana sanitasi yang layak	1 Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik	Persen	63	63,5-64		
		2 Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan	Persen	65	64-65		
		3 Jumlah Kawasan dengan genangan lebih dari 30 cm, selama 2 jam	Kawasan	N/A	N/A		
5	Meningkatnya Luas Ruang Terbuka Hijau di Jawa Barat	Jumlah kawasan Ruang Terbuka Hijau/Ruang Terbuka Publik/Revitalisasi Kawasan	Kawasan	N/A	N/A		
6	Meningkatkan Jumlah Rumah Layak huni	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	92	92,12-92,71		

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi		Realisasi sampai dengan tahun 2015	Target RPJMD sampai dengan tahun 2018
				2013	2014		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
7	Meningkatnya kemampuan dan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi baik penyedia jasa maupun pengguna jasa konstruksi	1 Persentase SDM Jasa Konstruksi yang bersertikat	Persen	N/A	27-29		
		2 Tingkat Kepuasan Instansi yang dibantu	Persen	N/A	N/A		
		3 Persentase penyelenggaraan jasa konstruksi yang tertib	Persen	N/A	N/A		
8	Terwujudnya pelayanan uji mutu konstruksi dan lingkungan yang optimal	Jumlah contoh uji yang dapat dilayani	Sampel	N/A	N/A		
9	Mewujudkan SDM aparatur, sarana dan prasarana yang handal	Jumlah SDM Aparatur yang bersertifikat di Bidang Pelayanan	Orang	N/A	N/A		
10	Pelayanan Prima Dinas kepada Masyarakat Jawa Barat	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Permukiman dan Perumahan	Persen	N/A	N/A		

Adapun tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2014 dan Pencapaian Renstra OPD terdapat pada lampiran 1.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan suatu tahapan dalam proses pembangunan. Perencanaan akan menghasilkan rencana yang selanjutnya diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan yang baik akan sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan suatu pembangunan, oleh karena itu dalam menyusun perencanaan pembangunan hendaknya diperhatikan berbagai faktor yang kemungkinan memiliki pengaruh bagi berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan harus memperhatikan jangkauan perencanaan dengan menekankan tujuan utama dari perencanaan tersebut dengan melihat Visi dan Misi pembangunan daerah serta Isu Strategis. Selanjutnya perencanaan pembangunan disusun berdasarkan tujuan dari efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dengan menyesuaikan terhadap fase-fase yang dilalui oleh perekonomian daerahnya, yaitu fase penyelamatan (*resque*), fase pemulihan (*recovery*), fase pemantapan (*stabilization*), fase pembangunan (*development*), dan fase melaju (*steady*).

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur No. 41 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu dari banyak pelaku pembangunan, karena sebagian besar urusan kewenangan untuk hal ini ada di kabupaten/kota.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, DISKIMRUM Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis urusan bidang permukiman dan perumahan;
2. Penyelenggaraan urusan bidang permukiman dan perumahan yang meliputi tata ruang kawasan, permukiman, perumahan, dan jasa konstruksi;
3. Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas bidang permukiman dan perumahan yang meliputi tata ruang kawasan, permukiman, perumahan, dan jasa konstruksi;
4. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD.

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Permukiman dan Perumahan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2014

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2014		Realisasi 2014	Capaian Kinerja Tahun 2014 (%)	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Ketersediaan Rencana Penataan Ruang di Jawa Barat	Jumlah Ketersediaan Perda RTR KSP di Jawa Barat	N/A	N/A	N/A	Belum dapat diukur	N/A
		Jumlah Ketersediaan Perda RDTR Kabupaten Kota di Jawa Barat	N/A	N/A	N/A		N/A
2	Terselenggaranya pemanfaatan ruang yang berkelanjutan	Persentasi kesesuaian pemanfaatan ruang di KSP Bandung Utara	N/A	N/A	N/A	Belum dapat diukur	N/A
3	Meningkatnya akses masyarakat terhadap ketersediaan air minum yang layak	Cakupan Pelayanan Air Minum	63	Persen	65,43%	103,86%	Sangat Baik
4	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana sanitasi yang layak	Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik	64	Persen	63,59%	99%	BAIK
		Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan	65	Persen	64,88%	99%	BAIK
		Persentase Jumlah kawasan dengan genangan lebih dari 30 cm, selama 2 jam)	95	Persen	0	0%	KURANG
5	Meningkatnya luas ruang terbuka hijau di Jawa Barat	Luas kawasan Ruang Terbuka Hijau/Ruang Terbuka Publik/Revitalisasi Kawasan	1	Kws	1 kws	100%	BAIK
6	Meningkatkan Jumlah Rumah Layak huni	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	92,71	Persen	92,43%	100%	BAIK

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2014		Realisasi 2014	Capaian Kinerja Tahun 2014 (%)	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
7	Meningkatnya kemampuan dan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi baik penyedia jasa maupun pengguna jasa konstruksi	Persentase SDM Jasa Konstruksi yang bersertikat	29	Persen	27%	93,10%	BAIK
8	Terwujudnya pelayanan uji mutu konstruksi dan lingkungan yang optimal	Kepuasan pelayanan uji mutu konstruksi dan lingkungan	N/A	N/A		Belum dapat diukur	N/A
9	Meningkatnya kinerja pengelolaan bangunan, gedung/rumah negara	Kepuasan instansi yang mendapatkan bantuan teknis pengelolaan bangunan gedung negara/daerah	N/A	N/A		Belum dapat diukur	N/A
10	Mewujudkan SDM aparatur, sarana dan prasarana yang handal	Jumlah SDM Aparatur yang bersertifikat di Bidang Pelayanan sesuai kompetensi	5	orang	1 orang	20%	KURANG
11	Pelayanan Prima Dinas	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Permukiman dan Perumahan	N/A	N/A		Belum dapat diukur	N/A

Sumber : LKIP Diskimrum Jabar. 2014

Pergeseran paradigma sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi memberikan implikasi terhadap perubahan sistem manajemen pembangunan daerah. Jika dalam sistem sentralistik peran pemerintah pusat sangat mendominasi perumusan kebijaksanaan pembangunan daerah, maka sebaliknya dalam sistem desentralistik kewenangan tersebut hijrah ke daerah. Disinilah pentingnya aspek perencanaan dalam pengembangan otonomi daerah. Aspek-aspek perencanaan ini tentunya akan sangat terkait dengan kewenangan otonomi yang menjadi urusan rumah tangga daerah, yang apabila dirinci adalah sebagai berikut : *Pertama*, melalui perencanaan harus dapat dibedakan antara fungsi wewenang daerah yang otonom dan fungsi-fungsi dekonstruksi yang masih direncanakan dan dibiayai oleh pemerintah pusat dalam proses pembangunan daerah. *Kedua*, bahwa melalui perencanaan dapat diperhitungkan potensi dan kapasitas daerah dalam pengembangan kelembagaan daerah dan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia secara lebih efektif. *Ketiga*, melalui perencanaan, otonomi daerah akan mendapatkan dukungan *planning power* sebagai jaminan bagi daerah untuk membangun sarana dan prasarana ekonomi, sosial dan budaya. *Keempat*, bahwa melalui perencanaan akan tumbuh secara *imaginative* proses, kekhasan, atau kearifan lokal yang dapat dimanfaatkan dalam proses kegiatan inovatif dan eksploratif yang dilakukan sebagai landasan pembangunan daerah.

Dengan demikian, paradigma perencanaan pembangunan harus berubah, dari orientasi “hanya” sebagai bagian dari proses administratif untuk mencapai tujuan organisasi publik secara internal, ke orientasi sebagai bagian “penting” dari proses pembuatan kebijakan dan alternatif tindakan untuk mencapai tujuan kolektif. Proses perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparan, akuntabel, responsif, dan partisipatif, dengan melibatkan seluruh unsur lembaga Negara, lembaga pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam pelaksanaannya.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DISKIMRUM

2.3.1. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Diskimrum

Isu strategis Pembangunan yang dihadapi Bidang Permukiman dan Perumahan dalam pembangunan prasarana dan sarana infrastruktur antara lain adalah:

1. Pengembangan wilayah yang belum ditunjang dengan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman. Berdasar RTRW Provinsi Jawa Barat (Perda No 22 Tahun 2010) terbagi Wilayah Pengembangan (WP) merujuk pada isu

strategis kewilayahan yang terbagi dalam 6 (enam) wilayah kerja koordinasi pembangunan : WP BODEBEKPUNJUR, WP PURWASUKA, WP KK CEKUNGAN BANDUNG, WP CIAYUMAJAKUNING, WP PRIATIM & PANGANDARAN, WP SUKABUMI.

2. Rencana pengembangan infrastruktur strategis yang sesuai dengan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang berjumlah 24 KSP. Untuk yang mendatang diperlukan perencanaan infrastruktur permukiman strategis di KSP Bandara Internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity, KSP Hulu Sungai Citarum, KSP Pesisir Pantura, dan KSP Pangandaran dan sekitarnya.
3. Tingkat Urbanisasi yang relatif tinggi dan belum disertai oleh tingkat kemampuan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang diakibatkan oleh pertumbuhan urbanisasi tersebut maupun backlog yang ada sebelumnya.
4. Adanya disparitas regional secara ekonomi dan sangat terkait dengan tidak meratanya ketersediaan infrastruktur dan layanan di bidang perumahan dan permukiman.
5. Ketersediaan infrastruktur dan layanan bidang perumahan dan permukiman belum merata ke semua golongan masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
6. Degradasi lingkungan perkotaan pada umumnya dan belum berperannya pembangunan dalam turut menciptakan kota yang asri dan lestari secara maksimal.
7. Belum maksimalnya perencanaan dan penerapan tata bangunan dan lingkungan kawasan perkotaan yang mengakibatkan wajah fisik perkotaan yang tidak tertata.
8. Keterbatasan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan infrastruktur khususnya di bidang pembiayaan.
9. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) Tahun 2016 di Jawa Barat.

Isu yang mendasari Rencana Kerja Dinas Permukiman dan Perumahan tahun 2016 adalah janji Gubernur Jawa Barat periode tahun 2013 – 2018 untuk :

1. Mengalokasikan Rp 4 Triliun untuk infrastruktur perdesaan
2. Rehabilitasi 100.000 rumah rakyat miskin
3. Pembangunan Pusat Seni dan Budaya Jawa Barat di Kabupaten/Kota
4. Pembangunan Gelanggang Olahraga di Kabupaten/Kota.

Sedangkan arahan perencanaan dari kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat adalah :

1. Percepatan pencapaian *Universal Access* 100-0-100 tahun 2019 yaitu tercapainya akses infrastruktur air minum dan sanitasi yang layak bagi seluruh masyarakat serta tertanganinya seluruh kawasan kumuh melalui peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur di dalamnya.
2. Keterpaduan Usulan Pembangunan Bidang Cipta Karya yang terbagi pada Prioritas Kabupaten/Kota Strategis Nasional (KSN) Provinsi Jawa Barat.
3. Dukungan pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum yang diprioritaskan sektoral.
3. Program/kegiatan pada tingkatan lingkungan/komunitas bersifat pemberdayaan masyarakat.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Diskimrum

Permasalahan teknis Dinas Permukiman dan Perumahan yang dialami selama pelaksanaan kegiatan antara lain :

1. Pada beberapa indikator program/kegiatan, target pelayanan tidak tercapai karena keterbatasan anggaran yang dialokasikan. Dengan adanya target pelayanan nasional atau SPM, maka pemerintah daerah diminta berkomitmen untuk menyelenggarakan pembangunan. Akan tetapi dana yang terbatas memaksa pemerintah untuk menentukan prioritas pembangunan.
2. Rendahnya komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran sehingga cakupan pelayanan yang dilakukan masih semu. Cakupan pelayanan tersebut dapat dicapai jika pemerintah Kabupaten/Kota juga melanjutkan pelaksanaan pembangunan yang notabene adalah wewenang mereka. Misalnya untuk pembangunan SPAM, pelaksanaan Sambungan Rumah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Jika tidak dilakukan karena adanya keterbatasan biaya, maka cakupan pelayanan yang ditargetkan belum tentu tercapai.

Untuk mengatasi permasalahan teknis tersebut maka perlu direkomendasikan :

1. Setiap tingkatan pemerintahan perlu pro aktif untuk menggalang dana swasta baik dalam bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR), bantuan dan hibah dari swasta

ataupun masyarakat dengan membina suatu tim khusus yang menjembatani kebutuhan pembangunan masyarakat dengan para penyandang dana.

2. Bersama Pemerintah Kabupaten/Kota berkomitmen terus untuk menyusun dan mengimplementasikan Rencana Terpadu Infrastruktur Investasi Jangka Menengah (RPI2JM) Bidang Cipta Karya dan Memorandum Program (MP) yang merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota
3. Memberdayakan masyarakat untuk ikut melaksanakan pembangunan sehingga masyarakat paham yang menjadi kebutuhan mereka dan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.

Dinas Permukiman dan Perumahan terus berupaya untuk menyelesaikan amanat pembangunan yang terkandung dalam urusan wajib bidang permukiman dan perumahan (keciptakarya) yang terdiri dari bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan.

Berikut ini uraian permasalahan utama yang menjadi tantangan Dinas dalam menunjukkan kinerjanya.

1. Bidang Pekerjaan Umum

Permasalahan utama pada Bidang Pekerjaan Umum adalah:

- 1) Masih kurangnya penyediaan dan distribusi pelayanan air minum;
- 2) Belum terpenuhinya 100% akses terhadap infrastruktur sanitasi permukiman (limbah, dan sampah);
- 3) terbatasnya penyediaan infrastruktur sampah regional.

2. Bidang Penataan Ruang

Permasalahan utama pada Bidang Penataan Ruang adalah:

- 1) belum memadainya pranata bidang penataan ruang khususnya rencana rinci tata ruang;
- 2) rendahnya keterkaitan fungsional antar wilayah perkotaan dan pedesaan;
- 3) menurunnya ketersedianya ruang untuk ketahanan pangan dan ruang terbuka hijau (RTH) publik;
- 4) belum terwujudnya sinergitas koordinasi penataan ruang baik yang bersifat fisik lingkungan, kebencanaan maupun ekonomi pada kawasan strategis provinsi;
- 5) belum optimalnya perwujudan ruang investasi di kawasan metropolitan dan pusat-pusat pertumbuhan di Jawa Barat.

3. Bidang Perumahan

Permasalahan utama adalah rendahnya kualitas hunian untuk rakyat miskin dan buruh serta tingginya backlog (tidak seimbangnya kebutuhan dan penyediaan) rumah sebanyak 1,3 juta rumah.

2.3.3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD

Melihat permasalahan tersebut di atas dalam lingkup Provinsi Jawa Barat, maka tantangan dan peluang dalam pengembangan bidang perumahan dan permukiman antara lain adalah sebagai berikut :

1. Amanat peraturan perundangan tentang penyelenggaraan pemerintahan (UU Nomor 32/2004) tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang sektor permukiman dan perumahan) yang menguatkan kembali peran provinsi dalam otonomi daerah.
2. Amanat peraturan perundangan sektoral terkait Bidang Permukiman dan Perumahan yang menegaskan peran provinsi dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan di bidang Permukiman dan Perumahan.
3. Pentingnya menekankan pembangunan bidang permukiman dan perumahan dalam RPJM Nasional dan Daerah dan menyelaraskan indikator pembangunan dalam RPJM Daerah dengan RPJM Nasional.
4. Penyusunan Roadmap Pencapaian Universal Access 100-0-100 Bidang Cipta Karya yang sesuai dengan RPJMN Tahun 2015-2019
5. Mengingat tingkat kebutuhan prasarana dan sarana permukiman dan perumahan, maka perlu meningkatkan kualitas perencanaan, penyusunan program dan kebijakan, pemutakhiran data, evaluasi kinerja dan pengalokasian anggaran yang optimal.

Sedangkan Ancaman yang dihadapi antara lain :

1. Sulitnya menekan laju urbanisasi dan jumlah penduduk sehingga sulit mengimbangi pemenuhan prasarana dan sarana.
2. Lemahnya penegakan hukum dalam pengendalian pembangunan bidang permukiman dan perumahan.
3. Kurangnya komitmen bersama dan masih adanya perbedaan tujuan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan permukiman dan perumahan.

4. Daya dukung lingkungan yang menurun dalam menunjang kegiatan permukiman dan perumahan (air, tanah, udara) yang disebabkan karena adanya perubahan iklim global.
5. Sulitnya proses pembebasan lahan sebagai bagian dari awal pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan.

2.4. Review Terhadap Rencana Awal RKPD Tahun 2016

Pembangunan Daerah tahun 2016 merupakan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, yang menekankan pada diversifikasi pembangunan Jawa Barat menuju pementasan pembangunan secara menyeluruh, untuk mencapai Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 yaitu:

"Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk Semua"

Untuk mempercepat pencapaian Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, ditetapkan 5 misi yang memiliki tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Bidang Perumahan dan Permukiman termasuk pada Misi Keempat yaitu **Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan**. Tujuan dan sasaran misi keempat ini adalah :

- 1) Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan pembangunan, dengan sasaran Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanganan bencana;
- 2) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk peningkatan produktivitas ekonomi, dan pelayanan dasar, dengan sasaran *pertama*, Meningkatnya kualitas pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat, dan *Kedua*, Meningkatnya percepatan pembangunan infrastruktur strategis.

Dengan memperhatikan berbagai isu strategis dan kebijakan strategi pembangunan Provinsi Jawa Barat, maka tema pembangunan Jawa Barat Tahun 2016 adalah :

"Peningkatan Daya Saing Jawa Barat untuk Kemandirian dalam Persaingan Global"

Tema pembangunan Jawa Barat Tahun 2016 tersebut mengarahkan pada perumusan prioritas pembangunan di berbagai bidang pada tahun 2016 yang berbasis sektoral melalui 10 (sepuluh) *Common Goals*, berbasis tematik kewilayahan, dan berbasis pembangunan wilayah perbatasan antar provinsi. Pembangunan sektoral, dilaksanakan berdasarkan 5 (lima) strategi yaitu: **Pertama**, pelibatan komunitas berbasis masyarakat dengan prinsip penguatan aktor lokal (*strengthening lokal actor*); **Kedua**, integrasi seluruh potensi nyata pembangunan dan daya saing di seluruh kabupaten/kota; **Ketiga**, penerapan manajemen pemerintahan model

hibrida sebagai penghela percepatan pembangunan, yaitu mengkombinasi manajemen berbasis daerah otonom Kabupaten/Kota dengan manajemen kewilayahan; **Keempat**, penguatan komitmen pelaksanaan pembangunan lintas sektor dan lintas pemerintahan; serta **Kelima**, peningkatan peran multi pihak dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan mutu serta akuntabilitas pembangunan.

Arah kebijakan pembangunan Tahun 2016 Bidang Pekerjaan Umum memiliki sasaran utama, yaitu : terwujudnya pengembangan penyediaan air baku, dengan kegiatan tematik adalah pemenuhan kecukupan air baku dan pengembangan infrastruktur air bersih, terkendalinya pencemaran limbah domestik, dan pengelolaan sampah regional.

Untuk penyempurnaan proses perencanaan pembangunan Jawa Barat Tahun 2016 terpilih 5 inovasi baru yaitu : (a) pelibatan komunitas berbasis masyarakat dengan prinsip penguatan aktor lokal (*strengthening local actor*); (b) integrasi hasil-hasil pembangunan tahunan kabupaten/kota bantuan provinsi dengan prinsip penguatan peran penanggungjawab sektor pembangunan; (c) penerapan manajemen pemerintahan model hibrida sebagai penghela percepatan pembangunan yaitu mengkombinasikan antara manajemen berbasis daerah otonom kabupaten/kota dan manajemen lintas kabupaten/kota berbasis metropolitan dan pusat pertumbuhan; (d) Integrasi komitmen pelaksanaan pembangunan lintas sektor dalam bentuk dokumen Rencana Aksi Multi Pihak-Implementasi Pekerjaan (RAM-IP); dan (e) peningkatan akses multi pihak dalam proses perencanaan pembangunan melalui RKPDJabar_Online 2101, KM-0_Pro Poor, SMS_Jabarmembangun, SMS_Satudatajabar. Perumusan perencanaan program dan kegiatan prioritas dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif dan mengikuti kaidah-kaidah prinsip *SMART PLANNING* (Perda No. 6/2009 tentang SISRENBANGDA), yaitu: spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*achievable*), memperhatikan ketersediaan sumberdaya (*resources availability*) dan memperhatikan fungsi waktu (*times*). Adapun isu strategis pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, yaitu:

- 1) Belum Optimalnya Kinerja Penataan Ruang Jawa Barat
- 2) Pranata Pelaksanaan Pembangunan Permukiman dan Perumahan Belum Memadai
- 3) Rendahnya Tingkat Cakupan Pelayanan Sarana Prasarana Permukiman dan Perumahan
- 4) Kemitraan, Kerjasama dan Penguatan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Permukiman dan Perumahan Belum Efektif

Adapun hasil penelaahan rancangan awal RKPD terdapat beberapa kegiatan yang perlu disesuaikan kembali dengan kebutuhan yang ada. Hal tersebut terkait dengan pencapaian

program dan kegiatan dengan tugas pokok dan fungsi Diskimrum dalam menangani proses pembangunan bidang permukiman dan perumahan Provinsi Jawa Barat. Untuk lebih jelasnya telaahan rencana kerja dalam RKPD dapat dilihat pada tabel review terhadap rancangan awal, sebagaimana pada Lampiran 2.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2016 berada pada tahap jangka menengah yang ke-empat yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan visi untuk mewujudkan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR.

Menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal). Di samping itu juga penelaahan mengenai pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD yang direncanakan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Diskimrum provinsi jawa barat.

Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional
Provinsi Jawa Barat

No	Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan
1	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi • Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya • Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berupa air minum dan sanitasi 	RPJP 2005-2025	
2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketersediaan infrastruktur sesuai tata ruang ▪ Terwujudnya konservasi sumber daya air dan terpenuhinya penyediaan air minum 	RPJMN 2015-2019	

No	Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan
	<p>untuk kebutuhan dasar Pengemb infrastruktur perdesaan mendukung pertanian.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemenuhan kebutuhan hunian didukung sistem pembiayaan jangka panjang. ▪ Terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh. 		
3	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) dan <i>demand</i> atas sanitasi layak • Implementasi penuh strategi sanitasi pada kabupaten/kota dengan prioritas sanitasi tinggi • Minimalisasi timbulan sampah, air limbah, dan limpasan air hujan • Perbaikan sistem <i>on-site</i> dan percepatan sistem <i>off-site</i> • Peningkatan operasi dan kelembagaan penyelenggaraan pelayanan sanitasi. 	BAPPENAS	Akses penduduk terhadap sanitasi layak 100%
4	<ul style="list-style-type: none"> • Memenuhi kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan (4K) pelayanan air minum untuk standar pelayanan minimum (SPM) dan peningkatan ekonomi • Restrukturisasi kelembagaan penyelenggara air minum dan air baku air minum • Mobilisasi peran serta masyarakat / Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) • Integrasi sumber-sumber pendanaan 	BAPPENAS	Akses penduduk terhadap air minum layak 100%
	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan minimal dan memperluas jangkauan pelayanan air minum terutama untuk MBR • Mengembangkan SPAM dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi • Meningkatkan/ memperluas akses air minum jaringan perpipaan terlindungi • Meningkatkan kualitas air minum • Menurunkan tingkat kehilangan air • Meningkatkan kemampuan finansial internal Penyelenggara SPAM. • Meningkatkan komitmen Pemerintah dan Pemda dalam pendanaan SPAM. • Mengembangkan pola pembiayaan melalui <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR). • Meningkatkan pendanaan melalui perolehan dana non-pemerintah. • Meningkatkan sinergitas antara BUMN-BUMD dalam percepatan SPAM 	Dit. PAM, DJCK Kemen PUPR	

No	Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat kapasitas SDM tingkat pusat dan daerah dalam pengembangan SPAM. • Memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. • Mendorong komitmen Pemda untuk lebih memprioritaskan Pengembangan SPAM. • Menerapkan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> untuk Penyelenggara SPAM. • Mengembangkan kapasitas SDM dengan pola <i>Center of Excellent</i>. • Mengembangkan manajemen aset dalam efisiensi dan efektivitas pengelolaan. • Mengembangkan kapasitas Pemda dalam pelaksanaan SPAM Regional. 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kesadaran Masyarakat • Peningkatan Kepedulian dan Komitmen PEMDA • Peningkatan kelembagaan dan kompetensi SDM • Peningkatan akses air limbah layak • Kerjasama lintas sektor • Pengembangan skala penanganan • Peningkatan kualitas perencanaan air limbah 	Dit. PPLP DJCK Kemen PUPR	

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

Jawa Barat sebagai provinsi dengan penduduk terbesar di Indonesia yang berbatasan langsung dengan ibu kota negara memiliki peran yang sangat strategis. Posisi geografis Provinsi Jawa Barat yang berbatasan dengan Ibu Kota Negara mempunyai pengaruh yang sangat berarti bagi Ibu Kota maupun pemerintah .

Tahun 2016 merupakan periode ke 3 Rencana Jangka Panjang Provinsi Jawa Barat tahun 2005-2025. Dimana pada periode tersebut dicanangkan sebagai periode **Memantapkan Pembangunan Secara Menyeluruh**. Pada tahun 2016 merupakan juga keberlanjutan pembangunan dari Kepala Daerah yang terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2013.

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Diskimrum Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan dan akan dicapai, adalah sebagai berikut:

1. Tujuan

a. Bidang Tata Ruang:

Terlaksananya penataan ruang yang berkelanjutan.

b. Bidang Permukiman:

Meningkatnya akses masyarakat terhadap

Akses prasarana dan sarana dasar permukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah).

c. Bidang Perumahan:

Meningkatnya pemenuhan perumahan yang mandiri dan produktif.

d. Bidang Jasa Konstruksi:

Terwujudnya keamanan & keserasian dalam pembangunan permukiman & perumahan melalui pembinaan penyelenggaraan jasa konstruksi.

e. Bagian Kesekretariatan:

Mengoptimalkan dukungan terhadap Dinas Permukiman dan Perumahan dengan mengembangkan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel.

2. Sasaran

a. Bidang Tata Ruang:

1. Terselenggaranya penataan ruang kawasan strategis berbasis daya dukung lingkungan dan potensi lokal.

2. Terselenggaranya penataan ruang dan pengelolaan perkotaan dan perdesaan yang memenuhi standar dan terintegrasi.

3. Terselenggaranya tertib penataan ruang melalui penguatan perangkat dan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penataan ruang.

b. Bidang Permukiman:

1. Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan dan sistem pengelolaan persampahan regional.
2. Meningkatkan cakupan pelayanan air minum di perkotaan dan perdesaan.
3. Meningkatkan cakupan pelayanan air limbah domestik
4. Meningkatkan sistem drainase kawasan dan regional
5. Meningkatkan penataan bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana dan kearifan lokal.

c. Bidang Perumahan:

1. Meningkatnya ketersediaan rumah bagi masyarakat khususnya MBR.
2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan.
3. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan.

d. Bidang Jasa Kontruksi:

1. Terlaksananya pembinaan teknis terhadap penyedia dan pengguna jasa konstruksi.
2. Terkendalinya penyelenggaraan jasa konstruksi.
3. Terselenggaranya pembangunan konstruksi yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

e. Bagian Kesekretariatan:

1. Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi.
2. Terwujudnya kelembagaan & ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi.

3. Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat.
4. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pengelolaan gedung/rumah negara.

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2016

Program prioritas masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan penjabaran dari program prioritas yang telah ditetapkan dalam RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2016 yang dituangkan dalam instrumen *Common Goals* dan *Non Common Goals*. *Common Goals* adalah program prioritas pembangunan dalam pelaksanaan tupoksi lintas sektor dan membutuhkan sinergitas tinggi. *Non Common Goals* (*Different Goals*), adalah dukungan mendasar untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; pemenuhan belanja tetap dan mengikat OPD, serta kegiatan yang bersifat sektoral atau rintisan.

Program prioritas Diskimrum dalam rangka pencapaian sasaran strategis masuk ke dalam prioritas kebijakan daerah yang berkaitan dengan Bidang permukiman dan perumahan adalah *Common Goal CG 3* Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku serta *Common Goal CG 6* Meningkatkan pengelolaan Sumberdaya Alam, lingkungan hidup dan kebencanaan. Disamping program prioritas tersebut diatas diperlukan program-program penunjang yang merupakan dukungan mendasar untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pemenuhan belanja tetap dan mengikat OPD serta kegiatan yang bersifat sektoral dan rintisan (*Non Common Goals*). Adapun Program-program penunjang Diskimrum Tahun 2016 (*Non Common Goals*) yang akan dilaksanakan adalah:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Aparatur
4. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur
5. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rencana Kerja Diskimrum Jabar tahun 2016 terdiri dari 11 program dan 59 kegiatan dengan Total pembiayaan sebesar Rp. 442.574.050.000 yang terdiri atas;

1. Program Penataan Ruang terdiri dari kegiatan:
 - Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di Jawa Barat
 - Penyusunan Naskah Akademis dan Raperda RTR KSP Sukabumi Bagian Selatan
 - Penyusunan Master Plan Karst Citatah
 - Evaluasi Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau di Jawa Barat
2. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman terdiri dari kegiatan:
 - Pendampingan Teknis UPTD BPSR
 - Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Rusunawa
 - Pengelolaan TPK Sarimukti
 - Kajian Pengelolaan Persampahan TPA Bersama
 - Pendampingan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Jawa Barat
 - Pendampingan Pengembangan SPAM Perdesaan
 - Pembangunan TPPAS Regional Nambo
 - Pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka
 - Pembangunan drainase Melong
 - Pendampingan untuk Pembangunan sanitasi Jabar

- GCB-Pendampingan Pengelolaan sanitasi bertumpu pada masyarakat (Sabermas) di DAS Citarum
 - Pengelolaan prasarana air limbah dan persampahan BIJB
 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Kec. Kertajati (mendukung BIJB)
 - Perencana Pengembangan SPAM Regional Barat-Timur
 - Perencanaan dan Pembangunan Penataan Kawasan Monumen Perjuangan Jawa Barat
 - Penataan TPA Leuwigajah
 - Persiapan Pembangunan TPPAS Regional Ciayumajakuning
3. Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari kegiatan:
- Verifikasi Bantuan Gubernur Bidang Keciaptakaryaan
 - Pendampingan Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan
 - Monitoring dan Evaluasi Bantuan Gubernur Penyediaan Infrastruktur Perdesaan
 - Pembangunan Mesjid Raya Provinsi Jawa Barat di Gedebage
 - Pembangunan Mesjid Provinsi Jawa Barat
 - Masterplan Bidang Infrastruktur Permukiman Perkotaan di Pusat Pertumbuhan
 - Masterplan Bidang Infrastruktur Permukiman Perkotaan di Metropolitan
 - Pendampingan Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni
 - Pembebasan lahan kawasan terpadu Growth Center Rancabuaya (GCRB)
 - Mekanisme dan Strategi Pendataan Bidang Perumahan
 - Perencanaan Rusunawa di KSP Jatiningor
 - Strategi Penanganan Permukiman Perdesaan Berbasis Kebencanaan
 - Kajian Lingkungan Pembangunan RUSUNAWA di Kab. Bandung Barat dan Kota Bogor

4. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari kegiatan:
 - Pemeliharaan Pengelolaan Rusunawa Pemerintah Provinsi Jawa Barat
 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat
 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran BPMKL
 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana BPSR
5. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari kegiatan:
 - Perencanaan Lingkup Bidang Permukiman dan Perumahan
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari kegiatan:
 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat
 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPMKL-Diskimrum
 - Peningkatan Sarana dan Prasarana BPSR (Revitalisasi)
 - Peningkatan Sarana dan Prasarana BP3JB
7. Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah Raga terdiri dari kegiatan:
 - PON-Pemeliharaan sarana dan prasarana penyelenggaraan PON XIX Tahun 2016 Tahap II
 - PON-Persiapan pelaksanaan penyelenggaraan dan penyediaan sarana prasarana non permanen pendukung venue PON XIX tahun 2016 Jawa Barat
8. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur terdiri dari kegiatan:
 - Peningkatan kesejahteraan Aparatur BPSR
 - Peningkatan Kesejahteraan dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BPMKL-Diskimrum

- Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat
 - Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BP3JB
9. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari kegiatan:
- Penyelenggaraan administrasi perkantoran BPSR
 - Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat
 - Peningkatan dan Pelayanan BPMKL
 - Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BPMKL-Diskimrum
 - Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BP3JB
10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari kegiatan:
- Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal
11. Program Pembinaan Jasa Konstruksi terdiri dari kegiatan:
- Peningkatan Kinerja Jasa Konstruksi
 - Pemberdayaan Jasa Konstruksi
 - Pembinaan Teknis Pengelolaan Gedung/Rumah Negara